

**PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, EKONOMI, DAN PELAYANAN UMUM
TERHADAP PARTISIPASI SEKOLAH DIPROVINSI SUMATERA SELATAN**

Oleh :

Ika Sasti Ferina, SE., Ak., MSi., CA; Abdul Rohman, SE., MSi.; Ermadiani, SE., Ak., MSi., CA.
Ubaidillah, S.E, M.M, Ak, CA;

ikasasti@yahoo.co.id
Abdulrohman2013@gmail.com
ermadiani@yahoo.co.id
ubaidillah1801@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis data rasio yang diperoleh dari variabel angka partisipasi kasar dan murni serta persentase realisasi belanja pada beberapa kelompok fungsi. Fungsi yang kami gunakan adalah belanja pada kelompok fungsi pendidikan, belanja fungsi ekonomi dan belanja fungsi pelayanan umum. Metode pengujian data dengan menggunakan linier berganda serta menggunakan alat bantu SPSS 20.

Penelitian ini ingin melihat pengaruh belanja fungsi pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pelayanan umum berpengaruh pada peningkatan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Angka partisipasi kasar dan murni menunjukkan partisipasi jumlah anak atau siswa yang sekolah dan jumlah anak pada usianya secara proporsional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi ekonomi dan belanja fungsi pelayanan umum tidak berpengaruh terhadap angkapartisipasi Sekolah (baik kasar maupun murni).

Keywords: Anggaran, Belanja, Angka Partisipasi kasar, Angka Partisipasi Murni

A. PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki tugas sebagai pelayan masyarakat (*public servant*). Pemerintah dengan segenap fasilitas yang dimiliki bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Masyarakat secara umum membutuhkan pelayanan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana social dan umum lainnya. Masyarakat memerlukan berbagai sarana dan prasarana tersebut karena masyarakat tidak memiliki sumberdaya yang diperlukan, untuk itu pemerintah harus menyediakannya.

Pemerintah melaksanakan pelayanan dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan yang akan dilaksanakan

setiap tahun bagi memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis bagi masyarakat umu (publik).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki berbagai fungsi. Adapun fungsi anggaran antara lain sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, dan alat motivasi (Mardiasmo, 2009). Meski anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki berbagai fungsi namun demikian anggaran juga memiliki keterbatasan

Anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki berbagai keterbatasan. Keterbatasan anggaran pendapatan dan

belanja antara lain, jumlah anggaran pendapatan dan belanja terbatas bila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Selain itu APBD juga memiliki keterbatasan mengenai pemrioritas dan distribusi sumberdaya yang ada.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki struktur rekening. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah anatara lain pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lain yang sah. Belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi basil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal(Kemdagri, 2006).

Pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2010 belanja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (dalam jutaan) sebesar Rp 3.225.412. Secara berturut-turut hingga 2014 mengalami kenaikan sebesar 110%, 147%, 179% dan 202% (Perimbangan Keuangan, 2014).

Pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan fungsi pendidikan. Pertumbuhan anggaran belanja pada fungsi pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2010 mengalami fluktuasi. Tahun 2010 jumlah anggaran fungsi pendidikan berjumlah (dalam jutaan) sebesar Rp 593,359, tahun 2011 sebesar Rp 298,218, tahun 2012 sebesar Rp 249,203, tahun 2013 sebesar Rp. 337,021 dan tahun 2014 sebesar Rp 371,147 (Subdit data keuangan daerah, 2014).

Pertumbuhan satuan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan hingga November 2015 tingkat SD/MI 5145 satuan pendidikan, SMP negeri dan swasta sebanyak 1693 unit dan SMA/MA sebanyak 766 serta jumlah satuan pendidikan SMK sebanyak 255 satuan pendidikan (Kemdikbud, 2015).

Gambaran data diatas menunjukkan permasalahan yang tidak sejalan dengan pertumbuhan masing-masing kelompok data. Pada pertumbuhan belanja terdapat kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan data pertumbuhan belanja fungsi pendidikan tidak menunjukkan hal yang sama.

B. PERMASALAHAN

Gambaran situasi pertumbuhan fiskal yang tercermin pada APBD Provinsi Sumatera Selatan memiliki berbagai makna yang dapat diterjemahkan pada berbagai aspek. Gambaran situasi tersebut dalam perspektif pelayanan pemerintah fungsi pendidikan memiliki berbagai macam intepretasi. Analisis yang dapat kami kemukakan dapat kami rumuskan sebagai formulasi permasalahan dalam penelitian kami antara lain:

1. Apakah belanja pemerintah fungsi pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pelayanan umum berpengaruh pada peningkatan angka partisipasi kasar?
2. Apakah belanja fungsi pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pelayanan umum berpengaruh pada angka partisipasi murni?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian atas belanja dan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar ini memiliki beberapa tujuan antara lain: Mengetahui pengaruh antara belanja pemerintah fungsi pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pelayanan umum terhadap angka partisipasi kasar.

Mengetahui pengaruh antara belanja pemerintah fungsi pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pelayanan umum terhadap pada angka partisipasi murni.

D. LANDASAN TEORI

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran adalah rencana keuangan dalam satu periode. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan dalam satu periode waktu yang disetujui oleh DPRD. Struktur anggaran terdiri dari Anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.

Anggaran pendapatan merupakan rencana keuangan pada aspek kas masuk dari berbagai sumber antara lain dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lainnya yang syah.

Anggaran belanja merupakan rencana keuangan pada aspek kas keluar dalam berbagai bentuk pengeluaran. Belanja memiliki beberapa jenis pengelompokan. Pengelompokan yang pertama adalah belanja wajib dan belanja pilihan. Kedua kelompok belanja menurut fungsi. Pada kelompok ini terdapat fungsi pendidikan, ekonomi dan pelayanan umum.

Anggaran pembiayaan merupakan rencana keuangan untuk menyelesaikan surplus dan deficit yang diakibatkan oleh penjumlahan anggaran pendapatan dan belanja. Pembiayaan terdiri dari pembiayaan penerimaan dan pengeluaran. Diharapkan setelah di jumlahkan dengan mekanisme pembiayaan maka tidak ada SILPA atau SIKPA pada penyusunan anggaran.

2. Belanja Daerah

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah

dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Kemdagri, 2006).

Klasifikasi belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu pertama klasifikasi belanja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. *Kedua*, klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut klasifikasi ini, belanja terdiri atas: pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tidak memasukkan fungsi "pertahanan" dan "agama" karena kedua fungsi tersebut adalah urusan pemerintahan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan tidak didesentralisasikan. *Ketiga*, klasifikasi menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tak langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang eksistensinya dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan yang direncanakan (terprogram). Belanja Tidak langsung adalah belanja yang eksistensinya dipengaruhi tidak secara langsung oleh adanya kegiatan yang direncanakan (terprogram). Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) adalah semua pengeluaran daerah untuk pegawai atau personel. Belanja pegawai yg merupakan kompensasi dlm bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil. Belanja Bunga; Belanja bunga digunakan untuk meng-

anggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Belanja Subsidi; Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tertentu adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa di bidang pelayanan dasar masyarakat. Belanja Hibah; Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dilakukan apabila pemerintah daerah telah memiliki kemampuan untuk menutupi belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial; Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Bantuan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial. Belanja bagi hasil; adalah Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu

kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Bantuan keuangan; Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Dan Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat tanggap darurat, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja pegawai (bagian belanja langsung); berupa honorarium/upah dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan. Belanja barang dan jasa, yaitu belanja yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Belanja modal, yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya (Kemdagri, 2010). Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah

penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. Rumus perhitungan APK adalah sebagai berikut (Kemdagri, 2010):

1. $APK_{SD} = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100 \right\}$
2. $APK_{SLTP} = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SLTP}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100 \right\}$
3. $APK_{SLTA} = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SLTA}}{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100 \right\}$

APK untuk SD kami beri kode APK 1, APK untuk SLPT kami beri kode APK 2 dan untuk APK untuk SLTA kami beri kode APK 3

4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia

sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan (Kemdagri, 2010). Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun. Rumus perhitungan APM adalah sebagai berikut (Kemdagri, 2010):

1. $APM_{SD} = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100 \right\}$
2. $APM_{SLTP} = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 yang sekolah di SLTP}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100 \right\}$
3. $APM_{SLTA} = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 yang sekolah di SLTA}}{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100 \right\}$

APM untuk SD kami beri kode APM 1, APM untuk SLTP kami beri kode APM 2 dan APM untuk SLTA kami beri kode APM 3.

E. PENELITIAN SEBELUMNYA

Beberapa penelitian yang terkait dengan realisasi belanja dan partisipasi pendidikan baik kasar maupun murni antara lain:

1. Nazamudin tahun 2013 dengan judul “Kontribusi pendidikan terhadap Pembangunan ekonomi: kasus provinsi aceh”,(Nazamudin, 2013).
2. Indah Dewi Nirwana tahun 2013 dengan judul Pengaruh Variabel Pendidikan terhadap persentase penduduk miskin (study pada 33 provinsi di Indonesia, 6 provinsi di pulau jawa dan 27 provinsi di luar pulau jawa pada tahun 2006-2011)(Nirwana, 2013), .
3. Bappenas tahun 2009 dengan judul Evaluasi pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun(Bappenas, 2009).
4. A. Paramita 2012 dengan judul “Analisis Dampak Realisasi APBD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Makassar Periode tahun 2000-2009”, (Paramita, 2012).
5. Tejo Nurseto tahun 2012, dengan judul evaluasi kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah sector pendidikan provinsi DIY, (Nurseto, 2012).
6. Abdul Azis tahun 2009 dengan judul pengaruh program bantuan operasioan sekolah pada departemen pendidikan nasional terhadap angka partisipasi kasar 2006-2008, (Azis, 2009).

F. METODOLOGI

1. Data

Data yang kami gunakan adalah data belanja dalam kelompok fungsi pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pelayanan umum.Windows data kami gunakan data dari tahun 2010 hingga tahun 2014.Tidak seluruh fungsi kami gunakan hanya yang relevan dan masih memiliki kaitan dengan aspek pelayanan pemerintah di bidang pendidikan.Data yang kami gunakan bersifat data sekunder dari berbagai laporan.Sumber

data bearasal dari laporan kementerian pendidikan dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah serta berbagai sumber lainnya.Data belanja dapat kami sampaikan pada table berikut:

Tabel 1. APM

Tahun	APM (%)		
	1	2	3
2010	94.17	43.49	66.27
2011	89.79	45.34	64.12
2012	92.67	48.98	67.75
2013	93.34	74.36	59.54
2014	91.51	65.47	52.19

Sumber: kementerian pendidikan

Table APM diperoleh dari Kementerian Pendidikan yang menyajikan laporan Angka Partisipasi murni.

Tabel 2. APK

Tahun	APK (%)		
	1	2	3
2010	113.75	60.87	82.12
2011	103.84	63.12	89.62
2012	106.09	69.00	86.62
2013	113.37	94.39	79.71
2014	115.78	92.19	72.93
2014	91.51	65.47	52.19

Sumber: kementerian pendidikan

Table APK diperoleh dari Kementerian Pendidikan yang menyajikan laporan Angka Partisipasi Kasar.

Tabel 3. Realisasi Belanja

Tahun	Pendidikan (%)	Ekonomi (%)	Pelayanan Umum (%)
2010	9.20	4.74	17.01
2011	8.36	9.19	48.64
2012	4.92	7.26	63.29
2013	5.85	9.07	60.64
2014	5.71	8.22	66.13

Sumber: diolah oleh peneliti

Table belanja diperoleh dari Kementerian Keuangan direktorat jenderal Perimbangan

Keuangan yang menyajikan laporan realisasi belanja seluruh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.

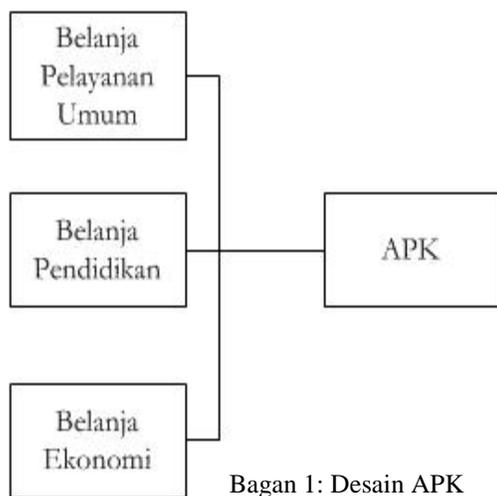
2. Variabel Penelitian

Penelitian kami menggunakan beberapa variabel. Variabel dependen menggunakan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Pemerintah Daerah yang kami jadikan obyek penelitian adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Variabel independen kami menggunakan realisasi belanja fungsi pendidikan, ekonomi dan pelayanan umum. Belanja fungsi pendidikan adalah realisasi belanja pada kelompok fungsi layanan pendidikan. Belanja fungsi ekonomi adalah realisasi belanja pada kelompok fungsi ekonomi. Belanja Fungsi Pelayanan umum adalah realisasi belanja pada kelompok fungsi pelayanan umum.

3. Desain Penelitian

Penelitian yang kami susun menggunakan hubungan satu ke banyak antara variabel terikat dengan variable bebas.



1. H0 = Tidak terdapat hubungan antara belanja fungsi pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pelayanan umum terhadap angka partisipasi kasar.
2. H1 = Terdapat pengaruh antara belanja pemerintah fungsi pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pelayanan umum terhadap pada angka partisipasi murni

Hipotesis tersebut kami susun menjadi beberapa kelompok sesuai kelompok APM dan APK.

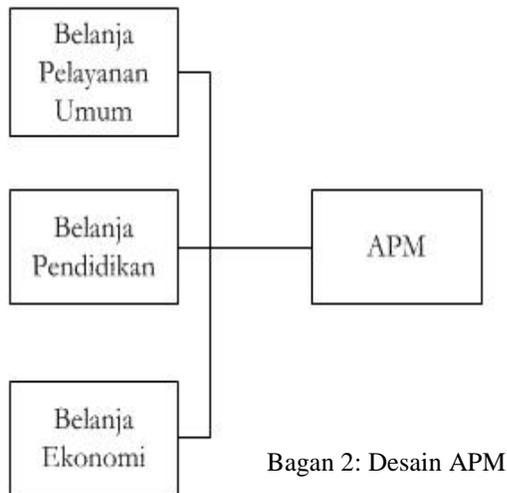
4. Persamaan Penelitian

Persamaan penelitian dari desain penelitian yang kami laksanakan adalah sebagai berikut:

$$Y1 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

Dimana:

- Y1 = Angka Partisipasi Kasar (APK 1, 2,3)
- a = konstanta
- b = Nilai koefisien variabel
- X1 = Belanja Pendidikan
- X2 = Belanja Ekonomi
- X3 = Belanja Pelayanan Umum
- e = error



Hipotesa

Hipotesis yang kami susun pada penelitian ini bersifat hiptesis asosiatif yaitu ingin menjawab pertanyaan apakah terdapat hubungan antar variable. Adapun hipotesa yang kami susun adalah sebagai berikut:

$$Y_2 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y_2 = Angka Partisipasi Murni (APM 1,2,3)

a = konstanta

b = Nilai koefisien variabel

X_1 = Belanja Pendidikan

X_2 = Belanja Ekonomi

X_3 = Belanja Pelayanan Umum

e = error

Masing-masing persamaan dikelompokkan pada jenjang sekolah yaitu SD (APK1 dan APM 1), SMP (APK2 dan APM 2) dan SLTA (APK3 dan APM 3). Hal ini kami lakukan karena pengelompokan masing-masing variable disesuaikan dengan pembagian kelompok jenjang sekolah yang menjadi obyek penelitian.

G. Metode Pengolahan Data

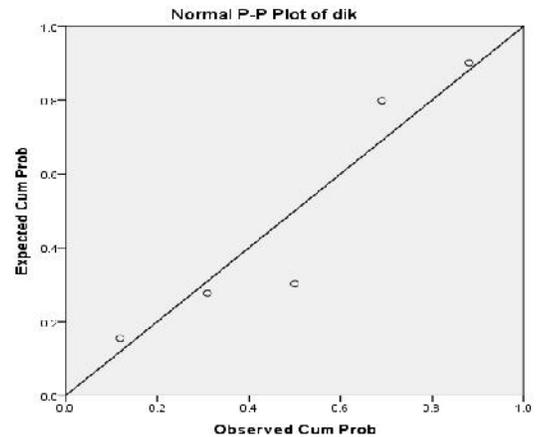
Metode pengolahan data yang kami gunakan adalah regresi linear berganda. Pengujian dilakukan satu per satu tidak secara bersamaan. Kami menggunakan regresi linier berganda dengan maksud untuk menguji hubungan antara beberapa variabel bebas dan variabel terikat. Kami menguji hipotesa dengan menggunakan perbandingan antara T hitung dengan T table, dan anova. Kami menggunakan alat bantu pengolahan data berupa SPSS20.

H. PEMBAHASAN HASIL

Hasil dari pengolahan data dapat kami sajikan dengan cara membagi menjadi beberapa bagian.

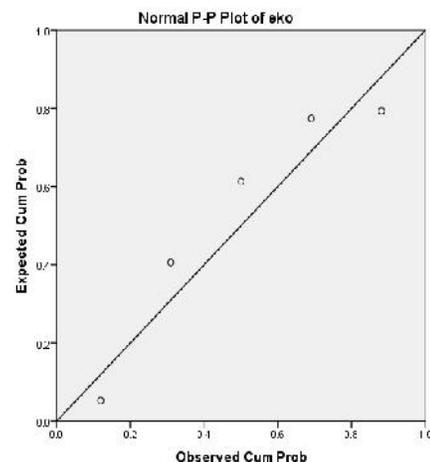
1. Pengujian data

- a. Sebaran data Belanja Pendidikan dapat ditunjukkan oleh diagram P-Plot sebagai berikut:



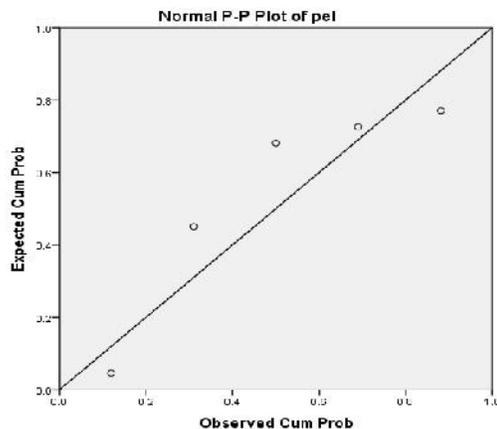
Gambar di atas menunjukkan sebaran data berada pada sekitar garis. Hal ini menunjukkan bahwa data bersifat normal.

- b. Sebaran data Belanja Ekonomi dapat ditunjukkan oleh diagram P-Plot sebagai berikut:



Gambar di atas menunjukkan sebaran data berada pada sekitar garis. Hal ini menunjukkan bahwa data bersifat normal.

- c. Sebaran data Belanja Pelayanan Umum dapat ditunjukkan oleh diagram P-Plot sebagai berikut:



Gambar diatas menunjukkan sebaran data berada pada sekitar garis. Hal ini menunjukkan bahwa data bersifat normal.

2. Hubungan antara belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum terhadap angka partisipasi kasar

Hasil pengujian data antara belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum terhadap angka partisipasi kasar menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Hubungan antara belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum terhadap angka partisipasi kasar pada kelompok jenjang sekolah SD. Hubungan tersebut ditunjukkan angka R pada table hasil regresi berikut:

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.366 ^a	.134	-2.464	9.78001

a. Predictors: (Constant), pel, eko, real

Pada table diatas tampak nilai R adalah 0,366 atau 36,6% yang artinya hubungan antara belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum mampu menjelaskan sebesar 36,6 % dan sisanya dijelaskan oleh factor lainnya.

- b. Hubungan antara belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan

umum terhadap angka partisipasi kasar pada kelompok jenjang sekolah SLTP. Hubungan tersebut ditunjukkan angka R pada table hasil regresi berikut:

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.723 ^a	.523	-.910	22.32753

a. Predictors: (Constant), pel, eko, real

Pada table diatas tampak nilai R adalah 0,723 atau 72,3% yang artinya hubungan antara belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum mampu menjelaskan sebesar 72,3 % dan sisanya dijelaskan oleh factor lainnya

- c. Hubungan antara belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum terhadap angka partisipasi kasar pada kelompok jenjang sekolah SLTA. Hubungan tersebut ditunjukkan angka R pada table hasil regresi berikut:

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.405 ^a	.164	-2.345	11.80727

a. Predictors: (Constant), pel, eko, real

Pada table diatas tampak nilai R adalah 0,405 atau 40,5% yang artinya hubungan antara belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum mampu menjelaskan sebesar 40,5 % dan sisanya dijelaskan oleh factor lainnya

- 3. Hubungan antara belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum terhadap angka partisipasi kasar

Hasil pengujian data antara belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum terhadap angka partisipasi murni menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Hubungan antara belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum terhadap angka partisipasi murni pada kelompok jenjang sekolah SD.

Hubungan tersebut ditunjukkan angka R pada table hasil regresi berikut:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error the Estimate
1	.966 ^a	.933	.733	.88157

a. Predictors: (Constant), pel, eko, real

Pada table diatas tampak nilai R adalah 0,966 atau 96,6% yang artinya hubungan antara belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum mampu menjelaskan sebesar 96,6% dan sisanya dijelaskan oleh factor lainnya.

- b. Hubungan antara belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum terhadap angka partisipasi murni pada kelompok jenjang sekolah SLTP.

Hubungan tersebut ditunjukkan angka R pada table hasil regresi berikut:

R	R Square	Adjusted R Square
.753 ^a	.566	-.735

a. Predictors: (Constant), pel, eko, real

Pada table diatas tampak nilai R adalah 0,753 atau 75,3% yang artinya hubungan antara belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum mampu menjelaskan sebesar 75,3 % dan sisanya dijelaskan oleh factor lainnya

- c. Hubungan antara belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum terhadap angka partisipasi murni pada kelompok jenjang sekolah SLTA.

Hubungan tersebut ditunjukkan angka R pada table hasil regresi berikut:

R	R Square	Adjusted R Square
.578 ^a	.334	-1.664

a. Predictors: (Constant), pel, eko, real

Pada table diatas tampak nilai R adalah 0,578 atau 47,8% yang artinya hubungan antara belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum mampu menjelaskan sebesar 57,8 % dan sisanya dijelaskan oleh factor lainnya

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hitpotesis H0 yaitu tidak terdapat hubungan antara belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum terhadap Angka partisipasi kasar.

Hipotesis:

Ho : B1=B2=0

Ha : ada Bi yang tidak nol
Pengambilan keputusan:

Jika F hitung <= T tabel atau probabilitas >= 0,05 maka Ho diterima
Jika F hitung > T tabel atau probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	14.811	3	4.937	.052	.978 ^b
1 Residual	95.649	1	95.649		
Total	110.460	4			

a. Dependent Variable: apk1

b. Predictors: (Constant), pel, eko, real

Dengan Dari tabel diatas dapat dilihat nilai F hitung yaitu 0,052, sedangkan nilai F tabel dapat diperoleh dengan menggunakan tabel F dengan derajat bebas (df) Residual (sisa) yaitu 1 sebagai df penyebut dan df Regression (perlakuan) yaitu 3 sebagai df pembilang dengan taraf siginifikan 0,05, sehingga diperoleh nilai F tabel yaitu 216. Karena F hitung (0,052) < F tabel (216) maka Ho diterima.

Berdasarkan nilai Signifikan, terlihat pada kolom sig yaitu 0,978 itu berarti probabilitas 0,978 lebih dari daripada 0,05 maka H_0 diterima.

Kesimpulan:

Tidak ada koefisien yang tidak nol atau koefisien berarti, maka model regresi tidak dapat dipakai untuk memprediksi nilai rapot

Pengujian hipotesis H_1 terdapat hubungan antara belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum terhadap Angka partisipasi kasar.

Hipotesis:

$H_0: B_i = 0$

H_a : ada B_i yang tidak nol, $i=1$ atau 2

Pengambilan keputusan:

Jika T hitung $\leq T$ tabel atau probabilitas $\geq 0,05$ maka H_0 diterima

Jika T hitung $> T$ tabel atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Pembahasan tabel:

1. Constant

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai T hitung untuk Constant yaitu 1,312, pada T tabel dengan db 1 dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 6,314, karena T hitung $< T$ tabel maka H_0 diterima sedangkan sig pada tabel B adalah 0,415 yang berarti probabilitas 0,415, karena probabilitas lebih dari 0,05 maka diterima, berarti B tidak berarti.

2. Belanja Pendidikan (dik)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai T hitung untuk belanja pendidikan yaitu -0,145, pada T tabel dengan db 1 dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 6,314, karena T hitung $< T$ tabel maka H_0 diterima sedangkan sig pada tabel B adalah 0,908 yang berarti probabilitas 0,908, karena probabilitas

lebih dari 0,05 maka diterima artinya B tidak berarti.

3. Belanja Ekonomi (eko):

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai T hitung untuk belanja pendidikan yaitu -0,140, pada T tabel dengan db 1 dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 6,314, karena T hitung $< T$ tabel maka H_0 diterima sedangkan sig pada tabel B adalah 0,96 yang berarti probabilitas 0,969, karena probabilitas lebih dari 0,05 maka diterima artinya B tidak berarti.

4. Belanja Pelayanan Umum (pel)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai T hitung untuk belanja pendidikan yaitu -0,525, pada T tabel dengan db 1 dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 6,314, karena T hitung $< T$ tabel maka H_0 diterima sedangkan sig pada tabel B adalah 0,942 yang berarti probabilitas 0,942, karena probabilitas lebih dari 0,05 maka diterima artinya B tidak berarti.

I. KESIMPULAN

Hasil pengolahan data menunjukkan H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian maka hasil penelitian dapat dirumuskan bahwa belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Hal ini berarti pengeluaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah siswa yang belajar yang belajarpada usia belajarnya dan jumlah siswa yang belajar pada waktu yang tepat. Jenjang pendidikan yang kami teliti masih pada jenjang pendidikan anak usia dini. Jenjang pendidikan pada kelompok sekolah menengah pertama

dan sekolah menengah umum belum dilakukan.

J. KETERBATASAN

Penelitian kami memiliki keterbatasan antara lain penelitian kami baru menguji pada angka partisipasi level atau kelompok pertama yaitu pada usia pendidikan anak usia dini. Seharusnya pengujian yang sama dilakukan pada kelompok kedua dan ketiga. Kelompok kedua yaitu pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Dan Kelompok ketiga yaitu pada kelompok sekolah menengah umum (SMU). Dengan demikian hasil penelitian ini masih parsial karena baru satu kelompok pendidikan atau satu jenjang pendidikan. Dengan demikian masih terdapat kekurangan bila ingin digeneralisasi ke seluruh angka partisipasi sekolah.

K. SARAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Sebagai bentuk saran kami selaku peneliti menyarankan agar pada penelitian berikutnya dilakukan penelitian pada kelompok kedua dan ketiga agar dapat diperoleh kesimpulan secara menyeluruh. Dengan penelitian yang menyeluruh maka implikasi bagi penelitian selanjutnya dapat menarik kesimpulan lebih menyeluruh dari bentuk hubungan antara realisasi belanja pada fungsi pendidikan, ekonomi dan pelayanan umum terhadap angka partisipasi sekolah baik angka partisipasi kasar maupun murni.

L. DAFTAR PUSTAKA

Azis, A. (2009). *Pengaruh program bantuan operasional sekolah pada departemen pendidikan nasional terhadap angka partisipasi kasar 2006-2008*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Bappenas. (2009). *Evaluasi pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun*. Jakarta: Bappenas.
- Kemdagri. (2006). *Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta: Kemdagri.
- Kemdagri. (2006). *Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta: Kemdagri.
- Kemdagri. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang tata cara pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kemdikbud. (2015). *Data satuan pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nazamudin. (2013). *kontribusi pendidikan terhadap Pembangunan ekonomi: kasus provinsi aceh*. Aceh: Jurnal Pencerahan nomor 2 vol 2 september 2013.
- Nirwana, D. I. (2013). *Pengaruh Variabel Pendidikan terhadap persentase penduduk miskin (study pada 33 provinsi di Indonesia, 6 provinsi di pulau jawa dan 27 provinsi di luar pulau jawa pada tahun 2006-2011)*. Malang: FEB Universitas Brawijaya.
- Nurseto, T. (2012). *Evaluasi Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sektor Pendidikan Provinsi DIY*. Yogyakarta: Jurnal Manajemen Pendidikan nomor 01/Th VIII/April/2012.
- Paramita, A. (2012). *Analisis dampak realisasi APBD terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Makassar periode tahun 2000-2009*. Makasar: Unhas.
- Perimbangan Keuangan, D. K. (2014). *Data APBD menurut fungsi*. Jakarta: Kemenkeu.
- Subdit data keuangan daerah, k. (2014). *Data Anggaran Provinsi*. Jakarta: Kemenkeu.